

## **BAGIAN I PENDAHULUAN**

### **1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan dimaksud disusun sesuai dengan sistem Akuntansi Pemerintahan.

Adapun maksud dan penyusunan laporan keuangan ini adalah :

- a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan ( **OPD Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen**) selama satu periode pelaporan.
- b. Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan Keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas.
- c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan Keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan Keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

## **1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen atas Pelaksanaan APBD Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

## **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### Bab.1. PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

### Bab .II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

### Bab.III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

### Bab.IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Bab.V. PENJELASAN POS-POS LAMPIRAN KEUANGAN

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan :

- 3.1. Pendapatan.
- 3.2. Belanja
- 3.3. Pembiayaan
- 3.4. Aset
- 3.5. Kewajiban
- 3.6. Ekuitas Dana

#### Bab. VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

#### Bab. VII PENUTUP

**BAGIAN II**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

**2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD**

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2017.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	19.000.000,-	17.353.511,-	91,33
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	25.000.000,-	24.819.880,-	99,28
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	10.760.000,-	10.754.000,-	99,94
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.000.000,-	3.000.000,-	100,00
6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.000.000,-	4.000.000,-	100,00
7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.040.000,-	8.040.000,-	100,00
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,-	2.500.000,-	100,00
9.	Penyediaan Komponen Peralatan Listrik	2.000.000,-	2.000.000,-	100,00
10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	1.440.000,-	1.440.000,-	100
11.	Penyediaan Makan dan Minum	8.000.000,-	7.992.000,-	99,90
12.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	13.260.000,-	13.260.000,-	100,00
13.	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1.000.000,-	1.000.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>			
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	22.000.000,-	22.000.000,-	100,00
2.	Pengadaan Mebelair	30.600.000,-	30.600.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI</b>			
1.	Penyusunan dan pengumpulan data / informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	4.460.000,-	4.460.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH</b>			
1.	Penyusunan Data Base dan Profil Desa / Kecamatan	6.300.000,-	6.300.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>			
1.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	6.070.000,-	6.061.000,-	99,85
	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>			

	Fasilitasi TKP2Kdes	4.900.000,-	4.900.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>			
1.	Fasilitasi APBDes	16.985.000,-	16.965.000,-	99,88
2.	Fasilitasi program pembangunan	5.950.000,-	5.950.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN</b>			
	Pembinaan PKK	56.500.000,-	56.500.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
1.	Penyelenggaraan Musrenbangcam	14.000.000,-	13.990.000,-	99,93
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>			
1.	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.500.000,-	3.500.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>			
1.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	3.573.000,-	3.208.000,-	89,78
2.	Pembinaan Sosial Masyarakat	4.500.000,-	4.500.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA</b>			
	Pembinaan Administrasi Desa	3.000.000,-	3.000.000,-	100,00
1.	<b>PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH</b>			
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	4.000.000,-	4.000.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>			
1.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	11.500.000,-	11.500.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			
1.	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	3.419.000,-	3.419.000,-	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH</b>			
1.	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	52.239.000	52.104.500	99,74

**REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH  
OPD KECAMATAN KARANGSAMBUNG  
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2017**

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN(Rp)	REALISASI ANGGARAN(Rp)	%
<b>1.20.31.1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	-	-	-
<b>1.20.31.5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.897.571.000,-</b>	<b>1.833.713.155,-</b>	<b>96,33</b>
<b>1.20.31.5.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.544.075.000,-</b>	<b>1.482.596.264,-</b>	<b>96,02</b>
	Belanja Pegawai	1.544.075.000,-	1.482.596.264,-	96,02
	Gaji dan Tunjangan	1.262.075.000,-	1.262.075.000,-	100,00
	Tambahan Penghasilan	282.000.000,-	280.800.000,-	99,57

<b>1.20.31.5.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>353.496.000,-</b>	<b>351.116.891,-</b>	<b>96,63</b>
	Belanja Pegawai	55.425.000,-	55.425.000,-	100,00
	Belanja Barang dan Jasa	239.831.000,-	237.457.891,-	99,01
	Belanja Modal	58.240.000,-	58.240.000,-	100,00

## **2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

Berdasarkan evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Terbatasnya Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Masih perlunya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis.

### **Solusi Pemecahan Permasalahan**

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi berikut :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan misalnya dengan BKD, SIMDA maupun pihak yang lainnya.

**BAGIAN III**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**  
**(Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan)**

**3.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI KEUANGAN (LRA)**

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2017, diketahui realisasi pendapatan sebesar **Rp. 2.344.000,-** atau mencapai **156,27%** dari target Tahun 2017 sebesar **Rp. 1.500.000,-**. Realisasi Belanja sebesar **Rp. 1.833.713.155,00** atau **96,33%**, dari anggaran Tahun 2017 sebesar **Rp. 1.897.571.000,00** sehingga terdapat defisit/surplus sebesar **Rp. 63.857.845,00**.

Laporan Keuangan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan Laporan Keuangan, beban dan defisit/surplus operasional dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Adapun realisasi pendapatan Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun 2016 sebesar **Rp 5.274.000,-** dan beban keuangan yaitu sebesar **Rp 1.683.962.000,00** sehingga terdapat defisit/surplus sebesar **Rp 1.683.962.000,00**.

Laporan Operasional (LO) Ekuitas Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, defisit/surplus keuangan, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2017 yaitu sebesar **Rp 63.857.845,00** atau naik sebesar **Rp 8.756.387,00** dibandingkan dengan Tahun 2016. Ekuitas Awal sebesar **Rp 55.101.458,00**, defisit/surplus sebesar **Rp 1.897.571.000,00**, koreksi ekuitas lainnya sebesar **Rp 1.833.713.155,00** sehingga menghasilkan Ekuitas Akhir sebesar **Rp 63.857.845,00**.

Neraca Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2017. Neraca Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2017 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. **1.833.713.155,00** atau

3.1.1 tambahan LRA

3.1.2 LO

3.1.3 NERACA

3.1.4 LPE

3.2 Pengungkapan atas pos-pos.....

#### **BAGIAN IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka Kecamatan Karangsembung mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada

Jumlah Karyawan Kecamatan Karangsembung sampai akhir bulan November 2017 sejumlah 22 (Dua puluh dua) orang dengan rincian berikut:

- 1) Berdasarkan golongan:

<b>No</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	IV	3	
2	III	5	
3	II	12	
4	I	2	
5	Non PNS	2	

- 2) Berdasarkan Ijazah

<b>No</b>	<b>Ijazah</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	SD	1	
2	SMP	2	
3	S L T A	13	
4	Diploma 1	1	
5	Strata 1	2	
6	Strata 2	3	

Sumber daya manusia di Kecamatan Karangsembung masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah Kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana HT yang memadai. Untuk tahun 2017 pada OPD Kecamatan Karangsembung sudah tersedia HT, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian. Evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan yang membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan Pemerintahan Desa.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

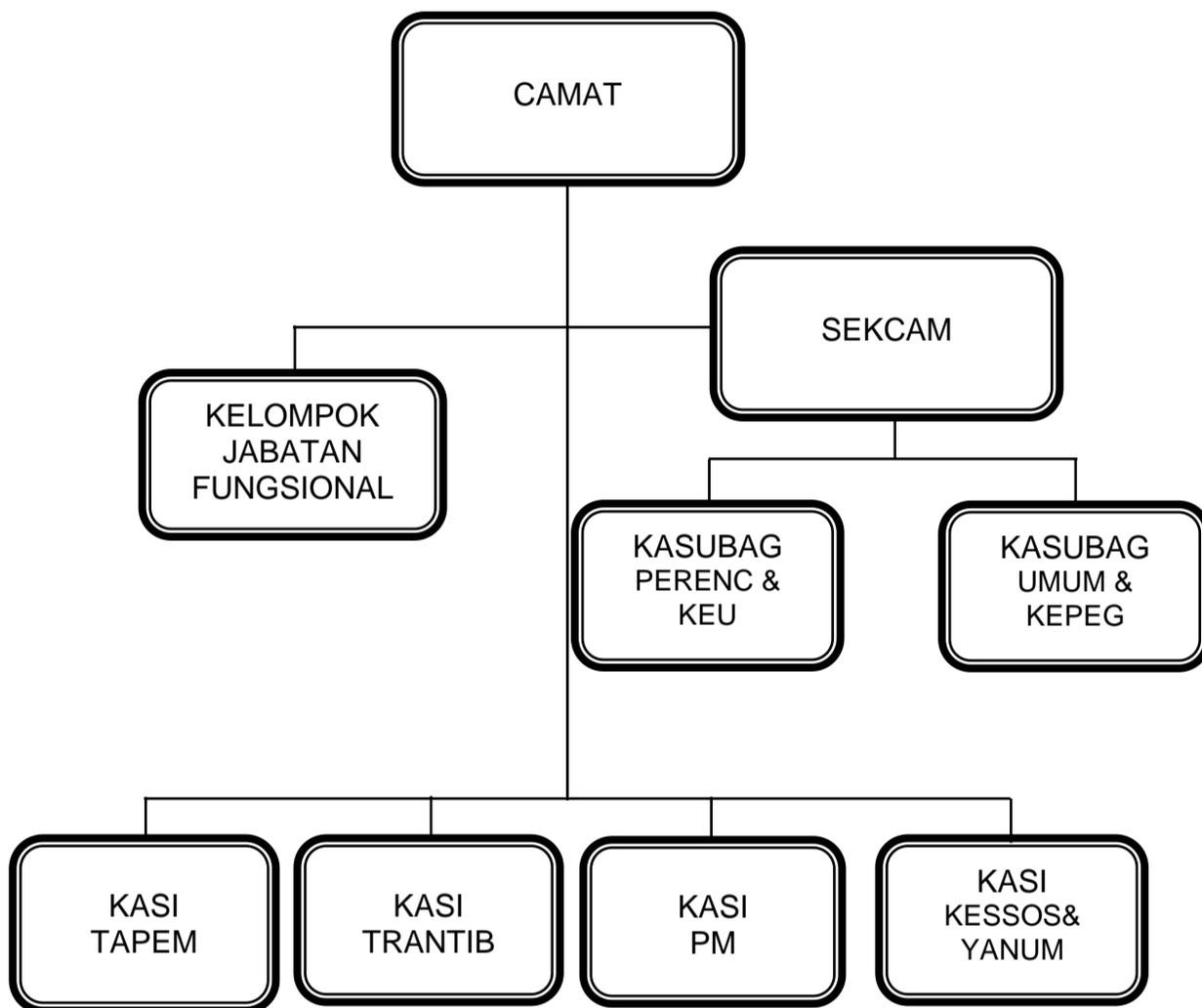
6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Karangsembung.

**BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI  
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN  
(Berdasarkan Perbub Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016)**



## **BAB V PENUTUP**

Catatan atas laporan Keuangan ( CALK ) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ).

Namun demikian, catatan Atas laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap laporan keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya catatan atas laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna bagi berbagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen.